

STRATEGI TATA KELOLA PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH DI KOTA TEBING TINGGI

Nur Azizah Rangkuti¹, Cut Nuraini², Feby Millanie³, Abdi Sugiarto³

¹Mahasiswa Program Magister Perencanaan Wilayah & Kota (MPWK)
Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

²Dosen Program Magister Perencanaan Wilayah & Kota (MPWK) dan Program Studi Arsitektur
Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

³Dosen Program Magister Perencanaan Wilayah & Kota (MPWK) dan Program Studi Arsitektur
Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB)

Corresponding Author's e-mail : arfan.marwazi87@gmail.com^{1*}

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 12 December 2023

Page: 1426-1432

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1082>

Article History:

Received: December, 01 2023

Revised: December, 10 2023

Accepted: December, 15 2023

Abstract : The purpose of this research is to analyze the strategies involved in the governance of slum settlements. The research was conducted in the city of Tebing Tinggi. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews, and survey focus group discussions. This research model uses SWOT analysis. The results obtained indicate that the strategies used include the improvement and optimization of collaboration in the implementation of programs between the central and regional governments by attaching completeness of supporting documents for the success of quality slum settlement governance and in accordance with the technical planning criteria in the Housing & Settlement Area Working Group (Pokja PKP). This constitutes an effort and support for the enhancement of advocacy by Regional Work Units (SKPD). Another strategy in proposing planning budgets for slum settlement governance activities suggests that budget input should be done strategically by preparing completeness of planning documents and other supporting documents to enhance the role of the government and social institutions in the community as a manifestation of the realization of slum settlement management programs.

Keywords : Governance, Slum Settlement, SWOT Analysis, Tebing Tinggi.

Abstrak : Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisa apa saja yang menjadi strategi pada tata kelola permukiman kumuh. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner, wawancara dan survey focus group discussion. Model penelitian ini menggunakan analisa SWOT. Hasil yang diperoleh yaitu strategi yang digunakan adalah peningkatan dan optimalisasi kolaborasi realisasi program pemerintahan pusat dan daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen pendukung keberhasilan tata kelola permukiman kumuh yang berkualitas dan sesuai kriteria teknis perencanaan pada Kelompok kerja Perumahan & Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) yang bentuk upaya dan dukungan terhadap peningkatan advokasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Strategi lainnya dalam mengusulkan anggaran perencanaan untuk kegiatan tata

kelola permukiman kumuh sebaiknya penginputan anggaran dilakukan secara strategis dengan penyusunan kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dalam meningkatkan peran pemerintah dan lembaga sosial pada masyarakat sebagai bentuk perwujudan realisasi program penanganan permukiman kumuh.

Kata Kunci : Analisis SWOT, Permukiman Kumuh, Tata Kelola, Tebing Tinggi.

PENDAHULUAN

Penduduk dan permukiman saling terkait; jika pertumbuhan populasi meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan akan rumah. Keterbatasan lahan perkotaan menyebabkan permukiman sempit, menyebabkan permukiman kumuh oleh golongan menengah kebawah. Urbanisasi di negara berkembang sering mengalami "urbanisasi semu" dengan masalah seperti kemiskinan perkotaan dan sektor informal yang meningkat. Di sisi lain, urbanisasi murni di negara industri maju adalah migrasi dari desa ke kota untuk memenuhi kebutuhan perkotaan tanpa menimbulkan masalah kemiskinan atau dampak negatif lainnya, memberikan manfaat bagi masyarakat (Iwan, 1994) & (Agustianto, 2002). Pada penelitian terdahulu diketahui bahwa hasil Analisa menggambarkan Kawasan Gampong Telaga Tujuh termasuk kawasan kumuh kategori berat ditinjau dari faktor-faktor meliputi rendahnya Pendidikan, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Telaga Tujuh tergolong kategori yaitu kawasan kumuh di tepi pantai dan wilayah rawan bencana alam. Penataan dapat menggunakan dua model yaitu permukiman kembali atau renovasi (Bachmid & Aruyanto, 2017). Penelitian lainnya menyarankan penataan kumuh yang memenuhi syarat untuk pembangunan, seperti Model Pembagian Tanah dengan kepemilikan masyarakat yang tinggi (Anne, 2011), (Rahmawati, 2018), (Rio, 2019) & (RPJMN, 2020)

Pemerintah pusat, melalui RPJMN 2020–2023, bertujuan mengatasi masalah ini dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Kebijakan ini mendorong pemerintah kota, termasuk Kota Tebing Tinggi, untuk mengembangkan strategi penanganan permukiman kumuh sesuai regulasi setempat. Masalah permukiman kumuh tidak hanya terkait dengan hunian, tetapi juga dampaknya pada lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi, seperti banjir, sanitasi buruk, dan keamanan (RPJMN, 2020). Regulasi Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 49 Tahun 2020 menegaskan hak setiap individu untuk hunian yang layak, menetapkan tanggung jawab Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh. Pemahaman karakteristik dan masalah dasar permukiman kumuh di Kota Tebing Tinggi penting dalam penanganan yang holistik dengan strategi Tata Kelola yang tepat (Peraturan Presiden, 2017), (Perkim, 2017) & (RPJMN, 2020).

Kawasan kumuh, atau "slum area," adalah wilayah permukiman dengan bangunan dan lingkungan tidak sehat. Meskipun kepemilikan lahan jelas, masalah utama adalah kesehatan lingkungan. Kawasan quarter adalah tanah yang dihuni oleh permukiman liar, dengan bangunan buruk, namun fokus pada status lahan ilegal. Menurut Sukanto Soerjono (1985), seseorang tanpa izin resmi di tanah disebut squatter. Hugo F. Pading (1986) menjelaskan wilayah *squatters* sebagai komunitas dengan bangunan semi permanen di tanah ilegal yang sering digunakan sebagai kawasan lindung oleh negara. Permukiman dan perumahan sering disamakan, tetapi perumahan menunjukkan rumah atau bangunan, sementara permukiman menitikberatkan pada manusia dan perilaku mereka (Nuraini, dkk 2021; Nuraini dkk, 2023). Klasifikasi kumuh atau slum berkaitan dengan gambaran buruk tentang sikap dan tingkah laku, yang ditentukan oleh standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Kumuh atau slum adalah area dengan status ekonomi rendah dan bangunan yang tidak memenuhi syarat kesehatan, dianggap tidak layak huni menurut kamus ilmu sosial dan sosiologi (Sukanto Soerjono, 1985), (Utomo Is Hadri, 2000), (Saaty, 2008) & (Wimardana, 2016)

Permukiman kumuh adalah lingkungan dengan kualitas menurun, baik secara fisik, sosial ekonomi, maupun budayanya (Muhajir, 2017). Keadaan ini mengakibatkan tingginya populasi hunian dan padatnya bangunan – bangunan tinggi serta tak beraturan, disisi lain kualitas rumah yang rendah juga menjadi salah satu akibatnya. Sarana dan prasarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah, dan sampah juga tidak memadai (Putro, 2011). Permukiman kumuh memiliki karakteristik seperti fasilitas umum yang kurang, kondisi hunian yang mencerminkan ketidakmampuan ekonomi, dan tingkat frekuensi serta kepadatan volume yang tinggi, menunjukkan ketidakberdayaan ekonomi dan kesemrawutan tata ruang (Hunger, 2001) (Surya & Subdistrict, 2015) & (Tajuddin, 2017). Permukiman kumuh dapat berupa komunitas tunggal di tanah milik negara, bagian dari RT atau RW, atau bahkan kelurahan. Penduduknya tidak homogen secara sosial dan ekonomi, dengan beragam mata pencaharian dan tingkat kepadatan (Tmuda, 2012) & (Malau, 2013). Mayoritas penghuni bekerja di sektor informal. Permukiman kumuh mencerminkan kondisi penghuninya yang kurang mampu atau miskin, terutama dalam hunian, penggunaan ruang, dan keterbatasan lahan hijau. Ketidaksiesuaian dengan persyaratan Ruang Terbuka Hijau mengubah fungsinya menjadi permukiman, menunjukkan kurangnya kemampuan untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan yang mahal. Permukiman kumuh muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, rumah yang buruk, kepadatan tinggi, dan ancaman terhadap kesehatan penghuni (David, 2009), (Bani, 2014) & (Evrianto, 2019).

METODE PENELITIAN

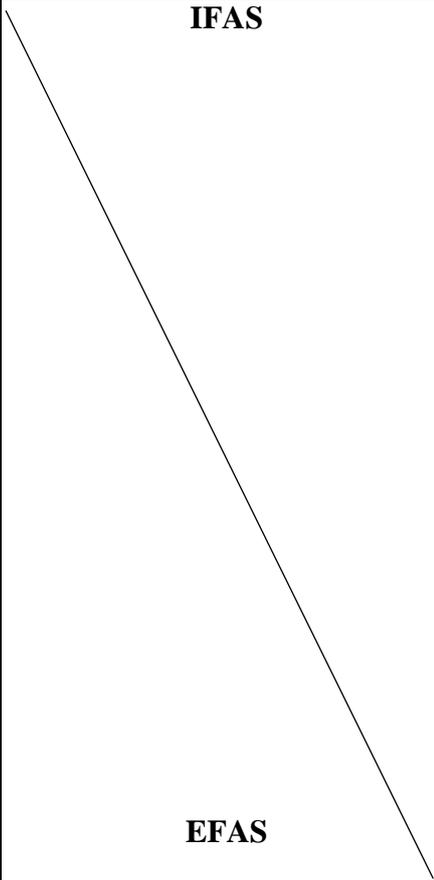
Analisis SWOT adalah metode penelitian untuk menganalisis strategi Tata Kelola permukiman kumuh dengan fokus pada strategi dari kekuatan dan peluang yang harus maksimal serta dari kelemahan dan ancaman yang harus di minimalisir. Matriks SWOT menghasilkan empat tipe penelitian yang akan diprioritaskan dalam Tata Kelola permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi, yaitu (S – O), (W – O), (S – T), dan (W – T), berdasarkan bobot dan nilai. Kombinasi data primer dan data sekunder sebagai jenis Analisa data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan dokumentasi untuk mendukung analisis strategi sesuai kebutuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS SWOT

Setelah membagi dan menilai pembobotan faktor internal dan eksternal, matriks SWOT digunakan untuk membuat strategi alternatif. Matriks ini terdiri dari strategi kekuatan untuk menangkap peluang (SO), strategi meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang (WO), strategi menggunakan kekuatan untuk mengurangi ancaman (ST), dan strategi meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (WT) (Freddy, 2017) & (Freddy, 2019). Matriks diuraikan sebagai berikut:

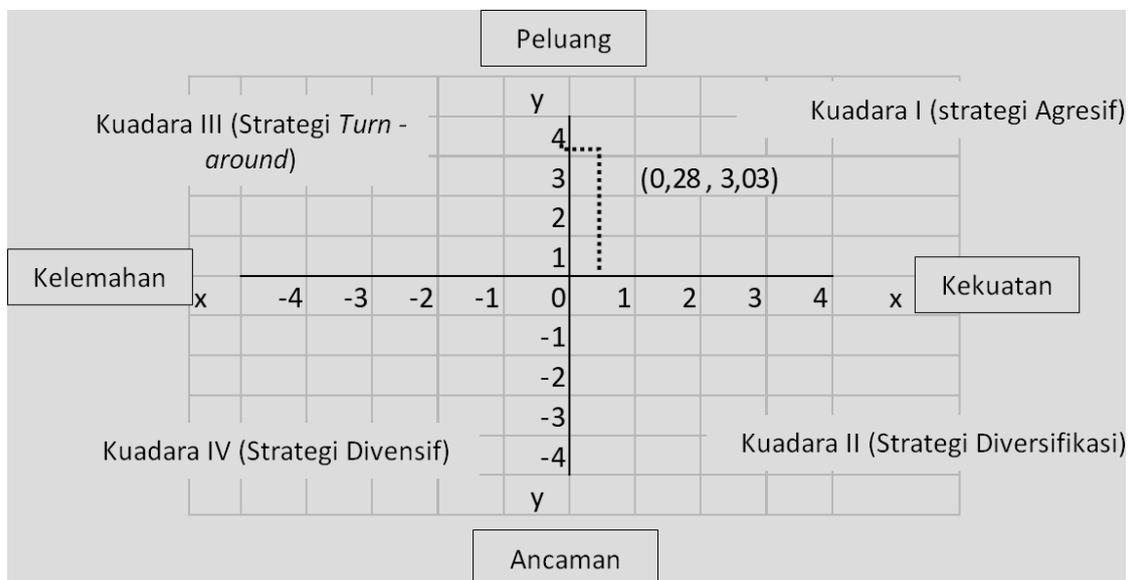
Tabel (1). Tata Kelola Pemukiman Kumuh di Kota Tebing Tinggi

<p style="text-align: center;">IFAS</p>  <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan – S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Lembaga POKJA PKP 2. Berlakunya peraturan daerah tentang pemukiman kumuh 3. Keberlanjutan misi pembangunan daerah tahun 2020 – 2025 4. Tersedianya dokumen POKJA PKP sebagai roadmap tata Kelola pemukiman kumuh 5. Tersedianya dokumen pendukung sebagai model perencanaan tata Kelola pemukiman kumuh di tingkat kelurahan 6. Tersedianya Lembaga pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan 	<p style="text-align: center;">Kelemahan – W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih lemah 2. Pada Lembaga POKJA dana fiscal yang diterima masih terbatas 3. Pengelolaan data POJKA PKP tidak merata 4. Izin pendirian bangunan dalam pengawasan yang belum memadai 5. Relokasi pemukiman kumuh dalam tata Kelola belum tersedia 6. Kerja sama pengawasan dan pemelihatatan tata Kelola pemukiman kumuh masih lemah 7. Tingkat kesadaran yang lemah akan pentingnya budaya hidup bersih dan sehat
<p style="text-align: center;">Peluang – O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota tebing tinggi merupakan salah satu kota dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat nasional tahun 2020-2025 2. Mentri PUPR memberikan akses program Infrastruktur Berbasis Masyarakat 3. Adanya penyaluran dana pelatihan dan sosialisasi terkait pengembangan SDM dan tata Kelola pemukiman kumuh 4. Kota tebing tinggi merupakan kota yang memiliki fungsi startegis 	<p style="text-align: center;">Strategi – SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi Lembaga POKJA PKP 2. Penerapan peraturan daerah tentang pemukiman kumuh dengan optimal 3. Peningkatan koordinasi program kerja sama sesuai dengan misi pembangunan daerah tahun 2020 -2025 4. Dokumen pendukung di susun dengan penyesuaian terintegrasi dan meningkatkan peran Lembaga sosial 	<p style="text-align: center;">Strategi – WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi perumusah program kerja sama tata Kelola pemukiman kumuh 2. Penyiapan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta dalam optimalisasi konsolidasi lahan 3. Bekerja sama dengan program yang di dukung oleh menkes terkait program PHBS
<p style="text-align: center;">Ancaman – T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi 	<p style="text-align: center;">Strategi – ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama antara pemerintah pusat, 	<p style="text-align: center;">Strategi – WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan peraturan terkait izin agar tidak

<p>akibat tingginya angka kekumuhan lingkungan</p> <p>2. Tingginya tingkat penyakit akibat pemukiman kumuh</p> <p>3. Urbanisasi penduduk meningkat</p> <p>4. Bpotensi tinggi bencana Alam seperti banjir dan Longsor</p>	<p>pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengawasi juga memelihara pemukiman kumuh dari rawannya bencana alam</p> <p>2. Perencana pengukuran atau skala dibutuhkan dan melibatkan masyarakat dalam penerapannya</p>	<p>terjadi pendirian bangunan pada daerah rawan bencana</p> <p>2. Peningkatan kerja sama dalam Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) untuk penyediaan lahan relokasi dalam tata Kelola pemukiman kumuh</p>
--	---	---

Sumber: Hasil Analisa Penulis

Berdasarkan perhitungan nilai bobot yang sudah di lakukan, selanjutnya adalah penentuan pada posisi titik koordinat Ifas dan Efas, dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar (1). Diagram posisi titik koordinat Ifas dan Efas model SWOT

Gambar diatas menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi mempunyai kekuatan dan peluang untuk merealisasikan Tata Kelola pemukiman kumuh dengan optimal. Kemampuan tata Kelola menjadi hal paling berpengaruh dalam kekuatan, tata kelolan kebijakan dan perencanaan akan memberikan peluang tinggi dan penyaluran dana yang stabil guna intervensi pusat terhadap penanganan kumuh di Kota Tebing Tinggi menjadi prioritas.

Strategi untuk menangani pemukiman kumuh di Tebing Tinggi melibatkan beberapa Langkah penting terutama pada strategi (SO) meliputi, pertama dengan peningkatan berkala kolaborasi antara program daerah dan pusat dengan menyediakan dokumen pendukung untuk memenuhi standar teknis perencanaan yang tinggi. Tujuannya adalah agar semua program terkait pemukiman kumuh didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota, termasuk program prioritas dari kementerian PUPR seperti Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Kedua, memperkuat peran POKJA PKP dalam koordinasi program, dukungan kepada stakeholder kota, serta memberikan kontribusi strategis dalam pengajuan anggaran perencanaan untuk pemukiman kumuh. Fungsi POKJA PKP sangat penting, dan kerjasama mereka dapat meningkatkan efisiensi pembangunan dan mengurangi luas pemukiman kumuh. Ketiga, Membuat dokumen perencanaan untuk penanganan pemukiman kumuh bersama dengan dokumen perencanaan

lainnya. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, pendekatan fasilitasi dan partisipasi digunakan untuk memastikan manfaat yang merata dari hasil penyusunan. Dokumen ini juga harus disesuaikan dengan Peraturan Walikota untuk memiliki kekuatan hukum. Keempat, meningkatkan dan merelasisasikan peran lembaga sosial dalam mendukung penanganan pemukiman kumuh, dengan fokus pada perubahan sikap, perilaku, dan tanggung jawab masyarakat. Melibatkan lembaga sosial dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan ekonomi rumah tangga atau berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan lingkungan. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan swadaya masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT, pemerintah Kota Tebing Tinggi berada di kuadran pertama. Oleh karena itu, strategi yang akan diimplementasikan melibatkan beberapa langkah, yakni meningkatkan kerjasama antara program daerah dan pusat dengan menyediakan dokumen pendukung berkualitas tinggi untuk memenuhi standar teknis perencanaan, memperkuat peran POKJA PKP dalam mendukung koordinasi program, advokasi SKPD, dan stakeholder kota, serta memberikan kontribusi strategis dalam pengusulan anggaran perencanaan untuk kegiatan Tata Kelola pemukiman kumuh. Selain itu, penekanan juga diberikan pada penyusunan dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, dan peningkatan peran lembaga sosial dalam mendukung penanganan kumuh. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, beberapa saran disarankan untuk mencapai optimalisasi Tata Kelola pemukiman kumuh, antara lain: (1) Pemerintah Kota Tebing Tinggi diharapkan melakukan penanganan masalah kumuh secara menyeluruh dan meyakinkan pada masyarakat yang terdampak kegiatan penanganan kumuh. (2) Masyarakat di pemukiman kumuh dihimbau untuk aktif terlibat dalam proses penanganan masalah kumuh, termasuk berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. (3) Kolaborasi dan keterpaduan program-program kegiatan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Tebing Tinggi, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk percepatan penanganan pemukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, S. 2002. *Analisis Model Konsep Penanganan Permukiman Kumuh*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Ahira, Anne. 2011. *Kesehatan Lingkungan Permukiman* (www.anneahira.com/kesehatan-lingkungan permukiman.htm).diakses 2 Juni 2020.
- Asiana Rahmawati. 2018. *Aplikasi SWOT Di Kawasan Permukiman Kumuh (Kelurahan Biring Romang)*. IPLB. Makassar
- Aziz, Iwan J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: FE UI.
- David, F.R. 2009. *Manajemen Strategi (konsep), Edisi 12*. Salemba Empat: Jakarta
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi. 2017. *Momerandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (MP RP2KPKP) tahun 2017-2019*. Perkim. Sumatera Utara
- Ervianto, W. I. 2019. *Tata Kelola Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Perkotaan*. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- Fasri Bachmid, & Ariyanto. 2017. *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Ternate*. Plano Madani, 6(2), 166–176.
- Hasanuddin, Perdatawati Bani. 2014. *Implementasi Revitalisasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar
- Hugo F. Reading. (1986). *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: CV Rajawali
- Hunger, J. David dan Thomas L Wheelen. 2001. *Manajemen Strategis*. Andi: Yogyakarta.
- Jawas Dwijo Putro. 2011. *Penataan Pemukiman kumuh Pinggiran Sungai Di Kecamatan Sungai Raya*. *Jurnal Teknik Sipil Untan*, Vol. 11 No 1, JUNI 2011
- Malau, W 2013. *Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan*. UNIMED. JUPIIS, 5(2).

- Mirad, Tumada. 2012. *Analisis Strategi Pembangunan kabupaten Muna*. Jakarta : FE.UI
- Nuraini, C., Alamsyah B., Novalinda, Sagala, P., Sugiarto, A., 2023. Planning with ‘Three-World Structures’ : A Comparative Study of Settlement in Mountain Villages. *Journal of Regional and City Planning*, Vol. 34, No. 1, page. 55-82, April 2023 DOI: 10.5614/jpwk.2023.34.1.
- Nuraini, C., Suprayitno, 2021. Karakter Lingkungan Perumahan Berbasis Space Attachment yang Adaptif dan Responsif di Mandailing. *Jurnal Arsitektur NALARs*, Vol. 20, No. 1 Januari 2021: 61-72 p-ISSN 1412-3266/e-ISSN 2549-6832.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024*.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. *Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Rangkuti, Freddy. 2019. *Swot Balanced Scorecard*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum Siagian, S.P. 2005. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Saaty, T. L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *Int. J. Services Sciences*.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, Press,
- Surya, B, U. B., & Subdistrict, D. P. 2015. *Modernization in the Development of a Town and Community – Based Management Strategy of Slum Areas: A Case Study: Urban Slum Areas of Sangatta, East Kutai Regency*. *Indonesia Economia : Seria Management*, 18(2), 177–195.
- Suryani Tajuddin. 2017. *Management of Slum Areas in Somba Opu Subdistrict Gowa Regency*. Tesis : UNHAS Makassar
- Syam, Muhajir. 2017. *Identifikasi Pemukiman kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Pemukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar
- Utomo, is hadri, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Imlementasi Proyek Peremajaan Permukiman Kumuh Di Bantaran Sungai Kali Anyar Mojosongo*
- Wimardana, A. S. 2016. *Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin*. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2).